

Seakan-akan Pemilu

Ariel Heryanto

...mereka memilih untuk berkampanye dengan bersuara keras, meraung-raung melalui knalpot sepeda motor. Bahkan ketika sempat dilarang, mereka tetap mampu bersiasat: ganti mengendarai becak sambil membunyikan rekaman suara knalpot sepeda motor! (Susanto, 1993: 37)

INSTITUSI sosial yang disebut Pemilihan Umum (Pemilu) dalam masyarakat Indonesia kontemporer merupakan sebuah pernyataan, bukan kenyataan, politik tentang demokrasi. Beda di antara keduanya seperti beda antara sepiring nasi goreng dengan sebuah kalimat “ini adalah sepiring nasi goreng” di atas kertas. Yang satu untuk dimakan. Yang lain untuk dibaca. Kegagalan memahami perbedaan ini bisa bikin sakit perut secara tidak perlu!

Beda di antara keduanya dapat dicermati lebih jauh. Yang satu (pernyataan) merupakan sebuah komunikasi yang dinamis di antara makhluk-makhluk yang hidup, dan terbuka pada pertarungan makna. Yang lain (kenyataan) adalah benda mati. Persoalannya bukan sekadar mana yang lebih bagus atau lebih mulia. Tetapi bagaimana kita menghadapinya.

Bab ini mengajak para intelektual dan aktivis Indonesia mengkaji ulang pemahaman dan kegiatan praksis mereka dalam proses demokratisasi di Indonesia. Bab ini akan dimulai dengan bahasan bagaimana Pemilu dapat dipahami, dan terlanjur disalah-pahami. Bagian berikutnya mengkaji ulang pengertian tentang kuasa. Di sini kekuasaan, seperti halnya penindasan, ditengok sebagai hubungan timbal-balik antara pihak yang berkuasa dan pihak yang dikuasai. Bukan sepenuhnya sebuah pertentangan, melainkan sebuah paradoks: mereka yang saling bersitegang ternyata juga saling bekerja sama dalam membina pertentangan itu. Bagian berikut dalam bab ini akan mengulas soal ‘perlawanan’ massa mengambang sebagai kaum lemah. Akhirnya, sebuah pemahaman baru terhadap tuntutan lama mengenai perundangan dan pelaksanaan Pemilu akan menjadi penutup bab.

Dalam banyak hal karangan ini diilhami oleh wawasan post-strukturalisme. Tetapi di sepanjang bahasan, dan khususnya di bagian akhir karangan, post-strukturalisme akan disikapi kembali secara kritis. Konkretnya, bab ini mendukung upaya para aktivis hak asasi di Indonesia untuk membenahi beberapa bagian yang penting dalam perundangan maupun proses pelaksanaan Pemilu. Hanya saja wawasan dan alasan yang mendasari upaya demikian perlu dikaji ulang, diperkaya, dan disegarkan terus. Wawasan post-strukturalisme memberikan sumbangan untuk pekerjaan yang tersebut belakangan ini.

Dalam kajiannya yang serius tentang gerakan demokratisasi di Indonesia menuju ke masa post-Suharto, sosiolog Singapura bernama Chua Beng Huat melaporkan bahwa kaum cendekiawan dan aktivis Indonesia yakin bahwa demokratisasi tidak harus bercorak liberalisme burjuis (1993). Pemilu bisa

menjadi bagian yang penting. Mengingat kuatnya wewenang yang diberikan UUD 1945 kepada lembaga kepresidenan, para aktivis ini menuntut agar seluruh anggota DPR dan MPR merupakan hasil pemilihan rakyat secara langsung. Maka kekuasaan eksekutif tak berhak menyaring-nyaring apalagi mengangkat wakil-wakil rakyat yang justru seharusnya memilih dan mengangkat pejabat eksekutif itu.

Bab ini tidak menyanggah pandangan demikian, tetapi menunjukkan perlunya memahami tanah pijakan yang kokoh untuk membangun aspirasi semacam itu. Khususnya dalam mengenal watak dan sepak-terjang massa rakyat yang selama ini diremehkan oleh pandangan umum yang sangat elitis. Massa sering direndahkan sebagai kaum apolitis yang hanya bisa berhura-hura dalam Pemilu.

Pengakuan Diktator, Kepicikan Sarjana

Banyak cendekiawan yang menuduh Pemilu kontemporer di Indonesia hanyalah sebuah sandiwara, penuh kepalsuan dan kepura-puraan. “Yang penting hanyalah apa yang tampak” (*The appearances are everything*), kata mantan koresponden *Far Eastern Economic Review* untuk Jakarta (Vatikiotis, 1994: 240). Tuduhan itu tidak salah, tetapi kurang jauh menjangkau persoalan. Yang hampir-hampir tak pernah ditanyakan apalagi diteliti adalah wujud/corak/sosok kepalsuan itu sendiri, dan bukan sekadar fungsinya (menipu/mengecoh/memalsukan sesuatu). Kebanyakan orang hanya puas dengan mengatakan pokoknya itu palsu. Dengan demikian kepalsuan atau sandiwara dianggap sekadar alat yang netral dalam dirinya sendiri. Yang dianggap penting hanya tujuan/akibatnya.

Pemilu bukan sekadar alat, wadah, sarana, tempat, waktu dan tata upacara untuk menyatakan sesuatu. Misalnya pilihan

suara, atau aspirasi politik. Ia adalah pernyataan itu sendiri yang menggunakan berbagai suara, kata-kata, gambar dan kotak suara sebagai bahan-bahan mentah. Tempat, waktu, atau upacara adalah unsur-unsur kebahasaan, seperti alinea, margin, huruf besar, atau titik-koma dalam sebuah kalimat.

Jika Pemilu dianggap sebagai sebuah proses demokratisasi, maka kita perlu bicara banyak tentang legalitas, sistem pengawasan, perolehan suara atau bahkan perubahan sosial. Juga tentang persaingan antarkontestan. Tentang menang dan kalah. Anggapan tentang Pemilu seperti itu masih dianut oleh banyak sarjana ilmu sosial yang memang dididik puluhan tahun untuk percaya pada mantra-mantra ilmiah dan kemenyaman akademik.

Tapi jika dipahami sebagai pernyataan atau wacana, bukan persaingan, maka Pemilu bukanlah soal kalah atau menang. Seperti halnya kalimat “ini nasi goreng” bukanlah soal rasalezat atau hambar, perut kenyang atau lapar. Sebagai pernyataan, Pemilu minta dipahami seperti halnya pengumuman, iklan, sajak, rambu-rambu lalu-lintas, menu makanan, atau telegram.

Kalau dipahami demikian, maka perlu disimak bukan saja apa pesannya, tetapi juga bentuk ungkapannya. Dengan unsur-unsur apa saja pesan itu disusun sehingga menjadi sebuah pernyataan yang jelas? Siapa pengarangnya, apa maunya, kepada siapa pernyataan itu ditujukan? Bagaimana pernyataan itu diterima, dicerna dan dipahami mereka yang menjadi sasaran pernyataan itu?

Orang tidak perlu membuang waktu berlama-lama di sekolah untuk memahami Pemilu sebagai pernyataan, bukan kenyataan, tentang demokrasi. Bagi orang yang sudah memahami hal ini maka kampanye, bukan jumlah suara, merupakan ba-

gian yang paling penting dalam keseluruhan peristiwa Pemilu. Kampanye merupakan pusat atau puncak hiruk-pikuk pengungkapan data, pesan, pernyataan, gambar, gerak yang sedang berpesta-pora.

Dalam masa Pemilu orang lebih sibuk bicara dan berdebat, bahkan baku-hantam, soal warna baju (kuning, merah, hijau —dan kemudian ditambah putih), gambar dan rekaman kaset suara pahlawan bangsa yang sudah wafat, serta suara motor tanpa knalpot. Ketika ada larangan terhadap sepeda motor tanpa knalpot di Yogyakarta, ada peserta kampanye keliling kota naik becak dengan membawa tape-recorder yang menyimpan rekaman suara sepeda-motor tanpa knalpot (Susanto, 1993: 37). Inilah Pemilu (dengan huruf ‘P’ besar)!

Tak banyak sarjana ilmu politik yang siap memahami makna dan kekuatan politis hal-hal yang tersebut belakangan ini. Soal-soal itu hanya dianggap sebagai lelucon. Atau dianggap pecikan, kembangan sampingan bagi suatu peristiwa politik yang sesungguhnya berpusat di tempat lain yang lebih nyata dan sejati. Misalnya terbentuknya susunan anggota parlemen. Karena itu banyak sarjana yang berkubang dalam penghitungan angka-angka perolehan suara. Ancaman Golput, misalnya, secara naif diukur dengan angka-angka persentase dari keseluruhan jumlah pemilik hak pilih.

Berkali-kali birokrat negara Demokrasi Terpimpin maupun Orde Baru menuduh bahwa para sarjana kita terlalu *text-book thinking*, terbiasa oleh bacaan sekolah. Akibatnya sistem politik Hindia Belanda dikaji dengan kerangka yang tidak pas. Seakan-akan Indonesia sama dengan negeri-negeri bekas tuan-tuan penjajah, darimana buku-buku untuk kuliah itu disusun. Pemilu dianggap sama dengan apa yang terjadi di negeri-negeri liberal. Tuduhan semacam itu ditanggapi para

sarjana dengan angkuh dan sinis sebagai taktik murahan dari birokrat Asia yang korup untuk membenarkan kekuasaan diktator dan menghindari tuduhan terjadinya kecurangan dalam Pemilu atau pelanggaran hak asasi.

Sudah saatnya para sarjana itu berpikir-ulang. Mungkin tanpa disengaja beberapa birokrat itu sedang membuat pengakuan yang jujur tentang kekuasaan di negeri bekas terajah yang memang tidak berlangsung secara sama persis dengan yang terjadi di negeri demokratik liberal. Tidak sama dengan negeri antah-berantah yang dibahas di buku-buku ilmiah para sarjana. Pemilu memang bukan terjemahan untuk istilah *general election* dalam bahasa Inggris. Daftar bacaan wajib dalam perkuliahan ilmu politik untuk mahasiswa Indonesia mungkin perlu dirombak besar-besaran. Supaya lebih cocok dengan pengalaman sosial kita selama ini.

Ini bukan berarti belum pernah ada sarjana yang peka dan paham peristiwa Pemilu ‘seakan-akan sebagai Pemilu’. Budi Susanto tidak keliru ketika mengingatkan agar kita tak usah terlalu risau apabila juru-kampanye cuma mengobral janji-janji gombal selama masa kampanye (1993: 64,73). Itu memang tidak dimaksudkan sebagai janji suci. Tetapi pengamatan Susanto perlu diteruskan.

Apa yang kedengarannya seakan-akan seperti janji-janji Pemilu itu bukan dusta, bohong atau tipuan. Tidak ada yang menipu. Tak ada yang tertipu. Massa rakyat tahu bahwa itu bukan janji. Karena itu mereka tidak pernah berminat me-nagih. Yang mengobral juga tahu bahwa massa tahu bahwa semua itu bukan janji yang dapat ditagih. Karena itu yang mengobral omongan kampanye tidak punya beban pikiran apa konsekuensinya kelak. Mereka tidak pernah berharap ada massa yang percaya dan sungguh-sungguh berharap ada

janji kampanye yang akan terpenuhi. Massa menonton di lokasi kampanye bukan pahlawan juru-selamat atau Ratu Adil, tetapi tokoh yang lebih dekat dengan pelawak atau seniman yang sedang menghibur.

Banyak sarjana yang terlalu serius menghadapi para badut Pemilu itu. Mereka kemudian menjadi marah atau kecewa menyaksikan semua itu. Mereka menuduh politikus telah menipu rakyat. Mereka menuduh kata-kata dalam bahasa Indonesia sudah kehilangan makna. Padahal massa rakyat lebih cerdas daripada yang disangka para sarjana beginian. Bahkan lebih cerdas daripada para sarjana yang mengasihani dan ingin membela mereka.

Massa bisa santai dan terhibur menyaksikan kampanye Pemilu. Tanpa dibebani harapan. Bahkan lebih jauh lagi, mereka bisa merongrong Pemilu justru dengan mematuhi semua logika dan tuntutan Pemilu. Tindakan ini bukan perlakuan, tetapi bisa lebih subversif ketimbang gerakan Golput, dan akan sulit sekali dipahami para sarjana ilmu politik yang susah ketawa dalam kepahitan politik. Lelucon dan parodi hanya dipahami para sarjana sebagai olok-olok untuk Pemilu yang telanjur dimuliakannya.

Pemilu sebagai Pesta

Sudah cukup banyak orang yang membicarakan Pemilu sebagai sebuah ritual, upacara, atau sandiwara. Ini dapat dikaitkan dengan pembicaraan yang sudah berabad-abad lebih tua tentang politik sebagai sebuah panggung sandiwara. Maksudnya bisa bermacam-macam. Ada yang sekadar melihat persamaan atau paralel di antara keduanya. Pada keduanya ada aktor. Sebagian jadi pahlawan, yang lain jadi penjahat. Dalam keduanya ada dialog, tipu-muslihat, kerja sama dan perang.

Ada harapan, pengkhianatan atau kemunafikan, ada pula kesetiaan. Ada tawa dan airmata. Semuanya membentuk rangkaian peristiwa dengan alur-cerita. Semuanya ditempatkan pada sebuah panggung yang seakan-akan terpisah dari dunia realita yang dihuni penonton.

Yang kini perlu lebih disimak adalah masih banyaknya orang yang menganggap kemiripan itu tak lebih dari sebatas kiasan dan pengibaran belaka (lihat juga Heryanto, 1994b). Atau sebagai ejekan kepada yang dianggap nyata/harafiah. Politik diibaratkan sebagai sandiwara dengan perasaan kecewa dan menyesal. Seakan-akan politik seharusnya bukan seperti sandiwara. Juga sebaliknya. Kemiripan politik dengan sandiwara dianggap sebagai suatu penyelewengan atau kecelakaan yang perlu dibenahi. Seakan-akan panggung yang memisahkan penonton dan pemain benar-benar merupakan pagar pembatas dua dunia yang sepenuhnya terpisah.

Seakan-akan politik lebih penting dan lebih nyata ketimbang sandiwara. Sandiwara sendiri dianggap tak lebih dari seni atau hiburan terbuat dari khayalan. Ini bukan saja kegalahan memahami kesenian, tetapi juga kegagalan memahami politik. Seakan-akan sandiwara sendiri bukan sebuah pranata atau unsur politis. Seniman telanjur dipandang lebih enteng ketimbang politikus atau sarjana yang menganalisa politik sebagai soal yang dianggap nyata, berbobot dan penting! Maka yang dibilang ‘artis-artis’ dalam masa kampanye hanyalah mereka yang menyanyi atau berjoged beberapa jam di atas panggung terbuka. Bukan pengarang utama dari seluruh kisah lakon Pemilu bersama seluruh manajer, sponsor, serta awak-pentas di panggung besar bernama Indonesia.

John Pemberton adalah seorang sarjana Amerika yang dengan bersungguh-sungguh meneliti Pemilu 1982 secara ha-

rafiah sebagai pentas atau sebuah ‘pesta demokrasi’ (1986). Ia cukup cerdas untuk tidak melecehkan semboyan ‘pesta demokrasi’ sebagai sebuah slogan kosong belaka. Atau sebagai propaganda. Atau ibarat dan kiasan. Bukan pula kepalsuan yang menyembunyikan sebuah rekayasa politik canggih.

Pemikiran Pemberton perlu didorong lebih jauh. Mungkin kita perlu berpikir sejauh Jean Baudrillard yang bicara perihal *simulacra* dalam masyarakat padat informasi (1983). Tidak ada yang lebih asli dan nyata daripada kepalsuan itu sendiri, katanya. Yang fiksi lebih faktual ketimbang yang dianggap fakta. Seperti bunyi rekaman tape recorder yang dibawa keliling dengan becak di Yogyakarta semasa kampanye Pemilu 1992. Rekaman suara sepeda motor tanpa knalpot itu tak kalah nyata, atau malahan lebih nyata, ketimbang suara knalpot ‘beneran’ atau ketimbang janji-janji juru kampanye.

Kepalsuan Pemilu tampil secara jujur dan telanjang bulat. Tidak untuk menipu siapa-siapa. Maka sungguh konyol jika para sarjana mencoba menguak dan mencari-cari apa yang ada di balik ‘kepalsuan’ itu. Jika ternyata tidak ada apa-apa, mereka mengada-ada. Misalnya mengaku menemukan ‘perlawanan budaya rakyat jelata’. Dengan demikian mereka menyelamatkan teori (juga fakultas/jurus) ilmu politik yang terlanjur mapan di universitas yang menjadi sarang dan sumber status mereka.

Pemberton membandingkan Pemilu sebagai sebuah resepsi pernikahan dalam adat Jawa. Bukan sebuah pertandingan. Tak ada yang kalah atau menang. Kalaupun ada, hal itu tidaklah terlalu penting di sini. Siapa yang bakal menang, yang jadi pusat perhatian, jadi pahlawan, sudah jelas sejak awal upacara. Persis seperti kedudukan mempelai dalam upacara pernikahan. Tidak ada kejutan. Semua sudah tahu siapa yang bakal jadi

pengantin.

Ada banyak orang yang terlibat dalam keramaian. Tetapi tak lebih banyak daripada menjadi tamu penggembira. Tempat berdiri, kursi duduk para tamu ini, kapan harus berdiri dan kapan harus duduk juga sudah diatur secara tertib oleh panitia. Dan tentu saja ada musik, sorak-sorai dan hiasan demi kemerahan. Kadang-kadang ada piring atau gelas pecah, dan sop tumpah. Itulah pesta yang punya silsilah dengan kata *fiesta*.

Tetapi ada beda besar antara satu ragam/genre pesta dengan ragam/genre pesta yang lain. Tidak semua pesta berlangsung seperti resepsi pernikahan menurut adat Jawa. Itu sebabnya, pengamatan Pemberton perlu didorong lebih jauh. Upacara terlalu menekankan ketertiban dan semuanya sudah diatur. Pada berbagai ragam pesta yang lain, apalagi yang dinamakan pasar-malam, tidak semuanya teratur atau dapat dikendalikan. Ketertiban ada, tetapi ketertiban itu tidak lagi menjadi panglima bagi segala-galanya. Para penggembira lebih bebas masuk-keluar kapan saja. Mereka lebih aktif bermain-main ketimbang para tamu dalam upacara.

Peristiwa Pemilu, khususnya kampanye, lebih cocok dibaca sebagai sebuah pesta atau pasar malam ketimbang ritual atau upacara pernikahan adat Jawa. Untuk politik dengan adat Eropa di zaman pertengahan, Mikhail Bakhtin membandingkannya dengan karnaval atau pawai arak-arakan yang cenderung urakan dan ugal-ugalan.

Paradoks Kekuasaan

Membandingkan Pemilu sebagai resepsi pernikahan juga punya kelemahan lain, yakni implikasi politisnya yang merugikan. Perbandingan itu menyatakan hubungan sosial yang ber-

sifat satu arah. Ada satu pusat, penyelenggara kegiatan yang menentukan seluruh jalannya acara. Sedangkan yang lain cuma tamu yang patuh. Membandingkan Pemilu sebagai sebuah pernyataan, sebuah kalimat tentang nasi goreng, punya kelebihan. Perbandingan ini mengandaikan adanya dua pihak yang berkomunikasi, sama-sama aktif, biarpun tidak sederajat. Yakni yang berbicara dan yang diajak bicara.

Hubungan kekuasaan memang lebih tepat dipahami sebagai sebuah komunikasi. Bisa dialogis ('demokratis'), bisa juga monologis ('otoriter'), seperti dijelaskan Bakhtin. Biarpun bersifat monologis, sebuah pernyataan tidak bisa memaksakan makna pesan yang dijejalkan pada pihak yang diajak bicara. Biarpun bersifat sepihak, sebuah pernyataan monologis tetap melibatkan si pendengar sebagai pihak yang aktif mencerna pesan itu.

Apa pun yang kita katakan, kata Bakhtin, hanya punya separuh makna. Separuh sisanya menjadi milik orang yang kita ajak bicara. Dalam bahasa sehari-hari, seorang bawahan yang paling nista dan dicaci-maki atau dicekoki propaganda masih bisa bicara dalam hati: "Lu boleh ngoceh apa aja, dengan ngotot kayak apa pun. Lu boleh bungkam mulut gua supaya nggak membantah. Pada akhirnya gua yang milih mana omongan lu yang perlu gua gubris mana yang gua anggap kentut."

Hubungan kuasa sebagai timbal-balik yang sering saya sebut-sebut sebagai contoh adalah penindasan terhadap kaum perempuan. Atau juga kolonialisme Eropa. Penindasan terhadap perempuan bisa berlangsung berabad-abad, antara lain berkat adanya kerja sama kaum lelaki dan perempuan dalam melestarikan penindasan itu. Bukan sepenuhnya karena kelihaian yang disengaja atau rekayasa kaum pria. Pemerintahan

kolonial Eropa bisa memeras bangsa-bangsa Asia dan Afrika selama lebih dari satu abad berkat kerja sama bangsa pribumi dalam berbagai hal. Contoh-contoh lain semacam ini dan implikasinya lebih jauh pernah saya uraikan terpisah (1994a).

Semua itu menunjukkan dua paradoks. *Pertama*, tidak ada kekuasaan yang bagaimanapun hebatnya bisa bersifat mutlak. Betapa pun otoriter, totaliter, atau hegemonis suatu kekuasaan, kekuasaan itu tidak pernah dapat menindas pihak lain secara total atau habis-habisan. Kekuasaan yang bagaimana pun dahsyatnya masih bergantung pada yang dikuasai dalam beberapa hal tertentu. Seperti orang yang menyumpah-nyumpahi orang lain sangat bergantung pada kemampuan dan kesiadaan orang yang disumpahi untuk memahami bahasa yang digunakan si penyumpah. Dengan demikian, selalu ada peluang perlawanannya dari pihak yang tertindas.

Seperti dikatakan Southwood dan Flanagan kekuasaan yang kuat dan keji hanya dapat berlangsung dalam suatu paradoks (1983: 211). Kekuasaan itu hanya dapat membunuh dan membinasakan tubuh yang ditindasnya, tetapi tidak dapat membunuh daya kreatif manusia dan hasrat yang ditindas untuk merdeka. Tapi bila tubuh kaum tertindas dibinasakan, maka si penindas tidak lagi bisa menjadi penindas dan menikmati hasil penindasan. Bayangkan jika kaum pria membunuh semua kaum perempuan. Atau seandainya penjajah Eropa membunuh semua bangsa pribumi. Atau para majikan membunuh budak atau buruh. Sementara itu bila kaum tertindas tidak dibunuh, maka penindasan itu tidak mungkin akan pernah stabil dan aman.

Kedua, tidak ada suatu perlawanannya macam apa pun yang sepenuhnya radikal atau total bertentangan dengan kekuatan yang dimusuhinya. Tidak peduli bagaimana radikalnya suatu

perlawanannya, pasti perlawanannya itu sedikit banyak ‘bekerja sama’ dengan yang dilawannya dalam beberapa hal tertentu. Ini seringkali bisa sangat mendasar dan di luar kesadaran yang bersangkutan. Ini sukar diterima, apalagi diakui kaum pejuang yang tertindas.

Seperti orang dimaki-maki yang balas memaki-balik. Kedua belah pihak hanya dapat bertukar sumpah-serapah selama mereka mempercayai bersama makna kata dalam bahasa yang digunakan untuk bertukar sumpah-serapah. Pemahaman seperti diatas bukan saja berbeda tetapi bisa bertentangan dengan apa yang biasa dihayati para sarjana ataupun aktivis kita. Mereka membayangkan dunia politik terbelah menjadi kubuk-kubu (kawan/lawan) yang secara tegas terpisah dan saling meniadakan dalam segala hal. Dengan wawasan post-strukturalis demikian, kita dapat membaca peristiwa Pemilu secara lain.

Kontestan Pemilu dan Golput

Pemilu bukanlah sekadar alat dari suatu penguasa yang digunakan dengan enak-enakan — misalnya seperti resepsi pernikahan Jawa — atau secara sewenang-wenang dan sepihak terhadap pihak lain yang pasif atau sepenuhnya patuh. Suatu pemerintahan yang bagaimana pun curangnya dalam Pemilu tidak dapat dikatakan sepenuhnya bebas memanipulasi Pemilu. Pemilu, atau sesuatu yang seakan-akan seperti Pemilu, menjadi beban kewajiban yang dijalankan banyak pemerintahan diktator untuk bisa mengesankan dan mengharapkan sebentuk keabsahan kekuasaan. Sebagai suatu pernyataan. Entah itu ditujukan kepada bangsa sendiri yang diperintahnya, atau masyarakat internasional yang diharapkan akan menjadi sumber bantuan dana atau dukungan diplomatik.

Tidak ada suatu pemerintahan diktator yang melaksanakan Pemilu dengan semau-maunya sendiri. Jika diberi kebebasan, para diktator lebih suka tidak mengadakan Pemilu macam apa pun. Tidak juga yang curang. Pemilu dan manipulasi Pemilu merepotkan saja. Jika mereka sampai mengadakan Pemilu, pasti dengan rasa terpaksa, biarpun (bukan justru karena) dengan keyakinan penuh akan ‘menang’. Bagi diktator yang mahakuasa, Pemilu bisa dianggap bertele-tele, makan banyak waktu, tenaga dan uang. Soal apakah rasa terpaksa itu nyata atau cuma perasaan mengada-ada, tidak terlalu penting. Yang penting rasa ia hadir dan bekerja.

Dengan mau mengadakan Pemilu, biar bagaimanapun palsunya atau curangnya, suatu pemerintahan sudah berkompromi dengan pihak-pihak lain. Entah itu di dalam maupun luar negeri. Sebaliknya, dengan ikut bertanding melawan partai pemerintah yang sedang berkuasa, para kontestan dalam suatu Pemilu yang bagaimanapun radikalnya sudah dengan sendirinya bekerja sama dengan partai pemerintah untuk menyuskan Pemilu.

Opposisi dan kolaborasi boleh-boleh saja dianggap berbeda, asal perbedaan itu tidak digambarkan secara mutlak dan dikotomis. Bagaimana para kontestan dalam suatu Pemilu dapat menganggap diri ‘opposisi’ bila tidak diperbolehkan mengkampanyekan program atau tokoh secara independen, tetapi harus disensor dulu oleh pihak yang sedang berkuasa? Bila tidak boleh mengkampanyekan sistem demokrasi dalam versi yang berbeda dari yang dirumuskan pihak yang sedang berkuasa?

Dengan pemahaman seperti itu, penampilan Golongan Putih (Golput) menjadi bin(a)tang langka yang memukau. Golput tampak radikal, justru (bukan walau) ia tidak mau

mengungguli Golkar dalam penghitungan suara dalam Pemilu. Golput menolak seluruh pertarungan jumlah perolehan suara para kontestan Pemilu. Golput menolak keabsahan Pemilu itu sendiri. Keangkeran Golput menjadi lebih berbobot karena di sepanjang sejarahnya banyak pihak, pemerintah mau pun swasta, berkampanye anti-Golput. Mereka memaki dan mengecam Golput. Masyarakat diingatkan agar waspada terhadap Golput. Bahkan di tahun 1992 pemerintah menangkap, menahan, dan mengadili Lukas dan Poltak, dua mahasiswa di Semarang yang dituduh mengkampanyekan Golput.

Di situ kita menyaksikan kembali sejumlah paradoks. Paradoks yang pertama, tentang sumber kehebatan Golput. Seperti berkali-kali dikatakan Arief Budiman, salah seorang tokoh awal Golput, bahwa pihak yang paling berjasa mengkampanyekan Golput adalah pemerintah. Pihak yang justru memusuhi Golput. Para pencetus Golput seperti Arief sendiri tenang-tenang saja. Lewat berbagai kecaman di media massa jauh sebelum masa kampanye, selama dan sesudahnya, Golput menjadi topik pembicaraan yang memikat kaum muda atau siapa pun yang kurang puas dengan tata-masyarakat yang ada. Tidak aneh bila kemudian ada majalah mingguan yang menampilkan Golput sebagai liputan utama. Ini berkat adanya kecaman menggebu-gebu dari sejumlah pejabat terhadapnya. Nasibnya seperti sejumlah tokoh yang dicekal atau buku yang disensor. Pencekalan dan sensor boleh saja dianggap berbeda dari promosi iklan, tapi asal tidak dipahami secara mutlak.

Ada paradoks lain yang layak dicermati. Sehebat-hebat radikalisme Golput, perlawanannya mereka masih berada dalam satu kerangka kerja sama dengan yang dilawannya. Baik bentuk, isi, simbol, maupun medan perlawanannya Golput masih mengukuhkan tradisi dan pranata Pemilu. Golput hanya hadir

bersamaan dengan kehadiran kontestan Pemilu lainnya yang sudah diresmikan dan direstui pemerintah. Lima tahun sekali. Golput lenyap bersama para kontestan yang resmi itu pula hingga lima tahun kemudian. Nama Golput sendiri mengingatkan orang pada nama Golkar.

Seperti ketiga kontestan lain, Golput punya warna identitas. Golput juga punya tanda-gambar berbentuk segilima, mirip tanda-gambar para kontestan yang resmi. Golput menampilkan diri dengan lambang jari empat, sementara kontestan resmi yang lain mengangkat tangan dengan jumlah jari kurang dari empat. Mereka menggunakan bahasa yang sama, walau untuk membuat pernyataan dengan pesan berbeda. Golput juga berkampanye dan mengajak orang menjadi pengikutnya, persis seperti para kontestan lain. Akhirnya, dan yang paling serius, Golput memperlakukan Pemilu sebagai sesuatu yang serius, seperti para kontestan lain yang mendukung tradisi Pemilu.

Semua itu menunjukkan bahwa penindasan suatu kekuasaan dan perlawanan terhadapnya seringkali punya lebih banyak kemiripan dan kerjasama daripada yang lazim diakui para pelaku dan pengamatnya. Semakin serius Golput menggugat Pemilu, semakin banyak ia membantu pemerintah yang berusaha menampilkan Pemilu sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh serius. Semakin serius pemerintah mengecam Golput, semakin besar gengsi dan semakin berbobot radikalisme Golput. Kedua pihak justru saling menguatkan posisi yang lain dengan cara saling mencela. Golput dapat dianggap berbeda dari para kontestan Pemilu yang tidak berjaya, asal perbedaan itu tidak dipahami secara mutlak dan tegas.

Kerja sama antara berbagai pihak yang kelihatannya saling bersaing dalam Pemilu terlihat jelas pada kasus pemogokan

kampanye Pemilu di Yogyakarta tahun 1992. Ketika pemerintah daerah DIY mengeluarkan larangan berpawai sepeda motor dengan knalpot terbuka, sejumlah besar simpatisan PDI dan PPP melakukan mogok kampanye. Mereka menurunkan semua atribut kampanye. Sebagian menyatakan akan menjadi Golput. Untuk mencairkan pemogokan ini, dengan berat hati pemerintah daerah mencabut larangan itu. Kerjasama terjalin kembali di antara berbagai pihak yang seakan-akan bersaing hingga acara Pemilu berjalan tuntas.

Kalau demikian halnya segala hubungan kekuasaan dan perlawanan terhadapnya adakah peluang bagi perubahan sosial yang fundamental? Darimana datangnya? Sebelum menjawab pertanyaan besar ini ada baiknya kita menengok kekuatan yang selama ini justru paling diremehkan atau dikasihani para tokoh terhormat dalam politik resmi, yakni massa rakyat. Atau massa mengambang, yang tidak hanya berada di desa-desa. Pada bagian berikut ini akan dipertimbangkan bagaimana kekuatan ini bisa menjadi lebih hebat dan subversif ketimbang semua pihak yang selama ini tampil seakan-akan sebagai kekuatan oposisi. Bukan oposisi sungguhan.

Massa Mengambang: Subversi di mana-mana

Massa mengambang menjadi kelompok sosial yang selama ini dianggap para tokoh politik sebagai pihak yang paling mengibakan hati, paling lugu dan paling apolitis. Hanya gara-gara pemerintah mencanangkan kebijakan massa mengambang, maka banyak pihak (termasuk sarjana) yang sedemikian gampang percaya bahwa apa yang telah ditetapkan pemerintah dengan sendirinya menjadi kenyataan. Ibarat sabda pandita ratu. Yang terjadi boleh jadi justru sebaliknya. Ini bisa diamati dari Pemilu, khususnya dalam kampanye Pemilu. Massa meng-

ambang menjadi kekuatan yang lebih subversif dan radikal secara politis dibandingkan dengan para partai oposisi atau pun Golput.

Massa rakyat menjadi lebih radikal dalam menghadapi Pemilu bukan dengan cara memprotes kecurangan pelaksanaan Pemilu seperti yang lazim dilontarkan kontestan partai resmi, atau juga para pengamat hak asasi manusia. Tetapi justru dengan menikmati kecurangan itu dan bertindak lebih curang. Massa menjadi lebih subversif ketimbang Golput bukan dengan cara menolak keabsahan pranata Pemilu, tapi justru dengan menerima dan menelannya mentah-mentah dengan lahap. Massa ini menjadi lebih politis dari kelompok sosial lainnya, karena mereka secara tuntas tidak pernah menghadapi politik Pemilu sebagai sesuatu yang serius.

Mereka menolak untuk sekadar menjadi apolitis, seperti yang diinstruksikan penguasa. Mereka memilih menjadi lebih apolitis ketimbang yang sekedar apolitis. Mereka menjadi maha-apolitis atau hiper-apolitis. Akibatnya tak jauh berbeda daripada lebih politis ketimbang yang politis. Dengan menolak menjadi oposisi, mereka menolak bekerjasama dengan kekuasaan yang berjaya untuk melangsungkan adu kekuatan. Menghadapi berbagai fiksi dalam Pemilu, mereka bertingkah lebih fiktif. Menghadapi kekuasaan yang keras, gila-gilaan atau absurd, mereka bisa bertindak lebih keras, lebih gila dan lebih absurd.

Mereka menggunakan logika ekstrem. Dalam cerita silat, ini ibarat menggunakan tenaga musuh untuk menjerumuskan musuh. Jika kampanye Pemilu memobilisasi massa, dan meminta massa ikut membanjiri alun-alun tempat kampanye, maka mereka akan hadir dengan banjir yang menghanyutkan. Jika mereka diminta ikut memeriahkan kampanye, mereka

akan berhura-hura lebih ribut daripada yang diminta. Jika juru kampanye mengobral suara bising yang tidak terikat dengan etika politik, apalagi demokratisasi, maka mereka menjawab lebih bising dengan sepeda motor tanpa knalpot. Sebaliknya, jika mereka dianggap bertindak terlalu liar dan diminta lebih tenang, mereka memilih mundur, mencopot tanda gambar, dan diam seribu bahasa. Mogok! Lalu menjulurkan lidah dan memain-mainkan jemari tangan di telinga.

Kasus rekaman knalpot di atas becak di Yogyakarta sudah menjadi contoh lain yang bagus. Akan lebih bagus bila rekaman semacam itu dibunyikan bukan pada saat berlangsungnya larangan berpawai sepeda motor dengan knalpot terbuka, tetapi justru pada saat tidak ada larangan semacam itu. Kepsusuhan yang dipalsukan. Bukan dibongkar untuk dicari kebenarannya yang sejati.

Dalam masa kampanye, massa dengan mudah berganti-ganti baju kaos, jumlah jari yang diangkat dan identitas. Mereka bisa setiap hari menjadi simpatisan setiap kontestan. Mereka sadar dan memanfaatkan secara maksimal kemajemukan identitas mereka sebagai subyek politik yang dianggap mengambang. Bukan menetap.

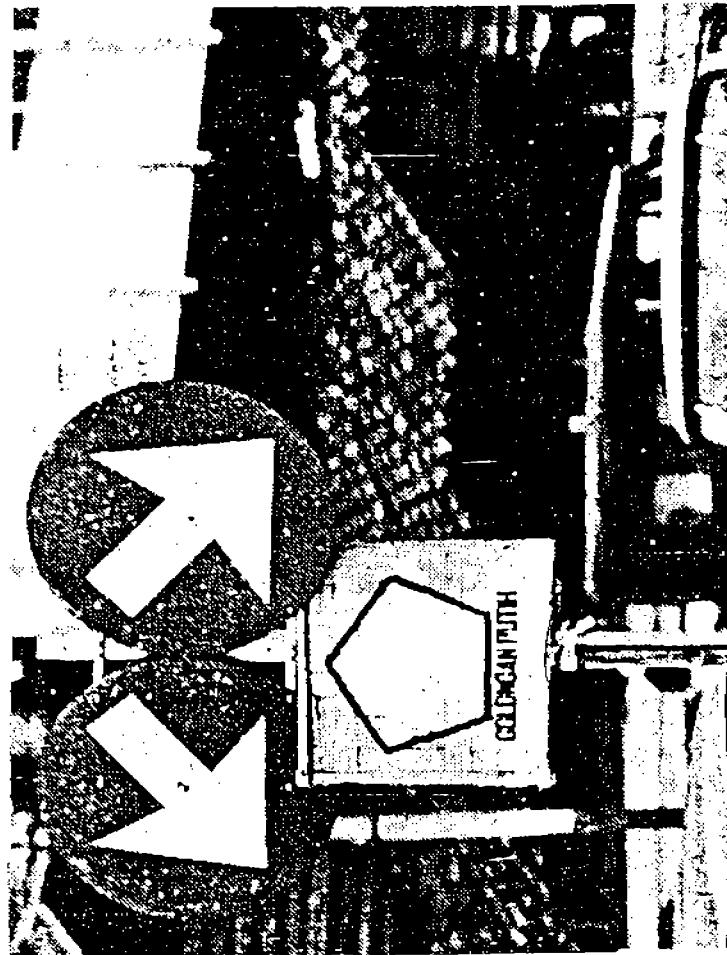
Ini bukan sekadar siasat untuk mendapatkan jatah baju atau makanan sebanyak-banyaknya dari semua kubu kontestan yang bertanding. Bukan sekadar perhitungan ekonomi atau material. Bukan juga suatu siasat politik rasional untuk menyerang satu pihak yang berkuasa. Tetapi karena dalam alih-identitas itu terbetik keceriaan. Iseng dan asyik. Dalam konteks ketidak-berdayaan, apa lagi yang bisa lebih politis dan membangkitkan daya hidup ketimbang kegembiraan dan kebinalan bermain-main iseng secara habis-habisan? Lihat Gambar 1.



Gambar 1.
Sumber: *Bernas*, 19 Mei 1992.



Gambar 2.
Sumber: *Bernas*, 23 Mei 1982.



Kampanye Golput menjelang Pemilihan Umum 1971

Gambar 3.
Sumber: *Tempo*, 13 Maret 1982.

Tampaknya di sinilah kegagalan banyak sarjana memahami kebinalan mereka. Hura-hura kampanye disesalkan dan dianggap kekacauan tanpa ujung-pangkal. Mungkin sekali karena pengamatnya salah-baca atau buta-huruf dalam bahasa politik massa. Atau sebaliknya, ke-binalan itu diromantisir dan dipolitisir sebagai siasat perlawanan terhadap penguasa, seperti yang ditafsirkan Budi Susanto (1993) atas kasus pemogokan kampanye di Yogyakarta. Spekulasi Jean Baudrillard boleh jadi lebih jitu memahami anarchisme massa. Mereka bukannya melawan tapi melahap semua yang dijejaskan kepada mereka dan kemudian memutahkan kembali utuh-utuh sebagai barang mainan.

perlawanan biasanya dipahami sebagai upaya memutarbalikkan pesan [dari pihak lawan] yang sudah dicocokkan dengan kaidah dan kepentingan kelompok sendiri. Sebaliknya, yang disebut massa menerima apa saja [yang dijejaskan kepada mereka] dan memantulkan kembali semuanya bulat-bulat sebagai tontonan, tanpa peduli kaidah apa pun, tanpa memberi makna [standingan], pada akhirnya tanpa perlawanan... (Baudrillard, 1983:43)

Hanya sarjana yang benar-benar naïf bisa mempercayai bahwa massa mengambang adalah kaum bodoh yang mudah ditipu dan tak berdaya digiring ke sana-kemari oleh para kontestan Pemilu. Atau sebaliknya, massa diromantisir sebagai oposisi yang terus-menerus mengadakan perlawanan sehari-hari. Maka tidak aneh bila kasus pemogokan kampanye 1992 di Yogyakarta sering kali dianggap sebagai kebangkitan Golput. Kebangkitan Golput sendiri dianggap sebagai puncak radikalisme dalam oposisi.

Mungkin kita harus menafsirkannya berbeda. Kasus di Yogyakarta justru menunjukkan bagaimana massa bisa lebih gila ketimbang yang berkuasa dan lebih radikal ketimbang Golput. Bagi massa rakyat semua pihak dan semua hal bisa



Gambar 4.
Sumber: *Tempo*, 30 Mei 1992.



Gambar 5.
Sumber: *Tempo*, 30 Mei 1992.

dijadikan barang mainan iseng dan lelucon, juga Golput, tanpa ampun. Ini terungkap dalam berbagai tingkah dan gambar yang mereka pasang. Seakan-akan mereka ini pengikut Golput, karena lambang Golput dimanfaatkan. Tapi semuanya dikemas tidak lebih dan tak kurang daripada sebagai banyolan. Gambar 2 berikut memberikan ilustrasi yang sangat jelas, yang tak mungkin terbayangkan oleh para aktivis yang mencetuskan Golput. Gambar ini berasal dari salah satu pusat kota Yogyakarta pada masa pemogokan kampanye Pemilu 1992.

Kalimat “Aku Ola Elu” dalam poster Gambar 2 menirukan ucapan bocah Jawa yang ingin tetapi belum bisa mengucapkan “Aku Ora Melu”, artinya “Aku Tidak Ikut”. Tapi apakah pembocahan wajah dan ucapan itu perlu dibaca sebagai peniruan belaka? Atau pemalsuan seperti juru-kampanye dan knalpot? Kepura-puraan? Atau ejekan? Selintas ini mengingatkan kita pada identitas resmi bagi massa yang mengambang yang telah dirumuskan penguasa: lugu, lemah, apolitis. Tetapi kedua tangan dan lidah si bocah dan kalimat itu sendiri jelas-jelas mengejek. Tanpa kebencian atau dan semangat perjuangan oposisi. Ini persis seperti bahasa isyarat yang dipakai massa pengendara sepeda-motor untuk mengejek aparat negara dalam Gambar 1 di atas.

Kini bandingkan Gambar 2 itu dengan Gambar 3 yang berasal dari masa awal gerakan Golput di Jakarta tahun 1971. Pada Gambar 3 kita saksikan kesederhanaan materi yang digunakan, mirip pada Gambar 2. Keduanya juga menampilkan diri di pusat lalu-lintas kota besar. Tetapi kontras keduanya juga kuat. Pada Gambar 3, ada semangat perjuangan yang bersifat serius dan urgen. Pada Gambar 2 yang kuat adalah canda dan keisengan. Pada Gambar 3 kita jumpai ungkapan

protes yang menggunakan wacana formal (bentuk segi lima yang teratur dan nama identitas yang resmi). Ini berbeda dari Gambar 2 yang sama sekali tidak formal dan berbahasa daerah, Jawa ngoko. Malahan berbau kampungan.

Dua gambar berikut menunjukkan dua fragmen yang berbeda dari gambar-gambar terdahulu. Gambar 4 dan 5 berasal dari gerakan Golput di dua kampus besar di Jawa Tengah. Keduanya mengisahkan perkembangan Golput setelah berusia dua puluh tahun. Pada Gambar 3 kita saksikan identitas Golput digelar di depan tempat ibadah di kampus terkemuka di Yogyakarta. Disini tetap ada semangat perjuangan pemuda; mirip dengan awal pertumbuhan Golput di Jakarta dua puluh tahun sebelumnya. Bedanya Gambar 3 ini mengambil setting di kampus, cagar intelektual Orde Baru. Bukan di jalan raya, atau tempat umum seperti Gambar 2 dan 3.

Pada Gambar 5 tampak pementasan protes Golput dalam bentuk kesenian. Jauh lebih canggih dan bernuansa subtil ketimbang semua gambar terdahulu. Golput dikemas menjadi ‘indah’. Juga berada di dalam pagar-pagar kampus. Tidak di tempat umum. Adegan yang difoto di sini menggambarkan bagaimana heroisme Golput mencapai salah satu kadar maksimalnya, ibarat sebuah monumen. Foto yang tampil di sini menampilkan citra lebih serius dan monumentalis ketimbang acaranya sendiri yang penuh humor dan tawa. Ironisnya, dari semua peristiwa yang dijepret para wartawan itu, peristiwa pada Gambar 5 yang menjadi sasaran tindakan represif dari aparatur kekerasan negara.

Usungan keranda demokrasi sering dipakai oleh demonstran. Juga dalam pemogokan kampanye oleh ‘Golput-Golputan’ di Yogyakarta di tahun 1992. Walau secara jasmaniah berbagai arak-arakan itu mirip, maknanya bisa sangat berbeda-

beda. Tidak semuanya dimaksudkan sebagai sebuah pernyataan keprihatinan yang serius. Apalagi khusuk seperti yang diduga Susanto. Seringkali justru sebagai banyolan yang menikam. Dan banyolan ini tidak selalu bebas nilai-politik. Tentang hal ini perlu dibahas terpisah di kesempatan lain.

Yang jelas semuanya itu menunjukkan bahwa massa bisa lebih lihai menyiasati kepalsuan Pemilu dengan kepalsuan balik. Juga dalam mengunyah identitas politik Golput, untuk kemudian dimuntah kembali dengan banyolan. Mereka bisa menampilkan Golput seakan-akan. Ini yang membedakan mereka dari Golput ‘sejati’ yang sejak semula selalu serius menggulati persoalan-persoalan Pemilu, demokrasi, dan politik.

Di sini tampak betapa piciknya para sarjana yang mencoba-coba mengukur kekuatan Golput hanya atau terutama dengan angka-angka persentase. Di tangan massa, tidak ada yang serius, tidak ada yang pahlawan atau bajingan. Benar atau salah. Baik atau buruk. Di kalangan pencetus awal Golput, yang ada justru kejahatan dan penyelewengan, yang hendak digantikan dengan kebenaran, kejujuran dan keadilan. Adakah yang bisa lebih subversif, radikal, dan anarkhis dari sepakterjang massa seperti itu?

Beranjak Lebih Jauh

Kampanye menjadi tanah air atau kampung-halaman massa mengambang, karena disini yang berlangsung adalah politik jasmaniah sehari-hari. Bukan moneter, bukan birokrasi, bukan simbol-simbol akademik, estetik atau politik yang secara hierarkhis akan selalu dikorup dan dikuasai kaum elit. Karena itu suara deru knalpot dan peragaan simbol-simbol kekerasan fisik menjadi bagian yang penting bagi mereka.

Seperti inilah senjata kaum massa, di Indonesia atau dimana

pun yang telah dilucuti hak-hak politiknya. Mereka tidak lagi bermimpi akan mendapatkan hak-hak itu kembali. Apalagi mengemis-ngemisnya. Mereka tidak pernah mencoba mendengar omongan para juru kampanye yang paling jujur sekali pun. Apalagi pada janji-janji dan slogan kampanye. Mereka tidak sekedar mau menonton para badut beraksi di panggung kampanye. Mereka bisa menghibur diri sendiri dengan cara mereka. Atau menjadi lebih badut daripada juru kampanye yang membudut.

Pemerintah bukannya tidak waspada pada dahsyatnya watak dan kekuatan politik massa yang terlanjur dianggap ‘mengambang’ dan terapung-apung enteng di atas samudra politik ini. Pemerintah sangat gelisah. Masa-masa kampanye merupakan masa-masa yang sangat menegangkan dan merepotkan aparat negara, bukan hanya di sektor keamanan. Disinilah dilema panitia penyelenggara Pemilu yang membutuhkan kerjasama dari massa yang diproklamasikan sebagai kaum mengambang tanpa daya.

Untuk memeriahkan Pemilu dengan keterlibatan seluruh rakyat Indonesia, kampanye hura-hura merupakan bagian yang terlanjur integral. Bila kampanye Pemilu terlalu sepi, maka pesta demokrasi dianggap gagal. Tetapi bila terlalu meriah, ini bisa mengancam stabilitas dan keamanan baik secara simbolik maupun material. Padahal stabilitas dan keamanan merupakan hal yang dimuliakan penyelenggara Pemilu. Keduanya dijadikan dasar, prasyarat dan tujuan penyelenggaraan Pemilu. Semua itu terancam oleh apa pun yang berlogika ekstrem. Termasuk kepatuhan yang ekstrem.

Sudah beberapa kali pejabat tinggi pemerintah mengusulkan agar dimasa mendatang kampanye Pemilu dibatasi hanya berlangsung di media massa saja. Alasan ini masuk akal jika

dihitung secara ekonomis dan teknis-praktisnya. Tetapi jika kampanye Pemilu benar-benar diwujudkan hanya sebatas layar televisi atau halaman koran maka kepalsuan, rekaan, fiksi Pemilu menjadi tuntas telanjang bulat-bulat!

Media massa adalah jagad simbol dan fiksi. Mirip panggung sandiwara. Disitu yang menjadi penting adalah aspek tontonan, dramatik, sensasi dan hiburan. Mirip iklan dan filem kartun. Yang tampil bukan lagi rekaman suara knalpot di arak di atas becak keliling kota, tetapi rekaman suara knalpot di tape recorder di atas becak yang direkam lagi dengan kamera televisi sebelum dipancarkan di layar televisi! Kepalsuan yang dipalsukan dan dipalsukan lebih jauh dalam kuadrat pangkat tiga.

Tidak mustahil khalayak massa mungkin masih mau menonton kampanye lewat televisi. Tetapi tidak lagi seperti ketika mereka ikut terlibat secara jasmaniah dalam arak-arakan kampanye. Mengapa massa mau berjubel di stadion sepakbola dan kemudian berbaku hantam disana, padahal pertandingan yang sama ditayangkan di layar televisi? Masih adakah —dan bila ada macam apakah — yang perduli pada politik dan Pemilu, bila politik dan Pemilu hanya tampil di sela-sela videoklip atau “sesudah pesan-pesan berikut ini....” (sabun cap anu, obat batuk cap ini, atau permen karet cap itu)?

Massa tak pernah apolitis apalagi mengambang secara pasif dan jinak. Ia bisa menggeliat dan menabrak dengan jurus-jurus yang tidak terduga dengan memanfaatkan secara ekstrem tenaga apa pun dari lawan yang mencoba mengendalikannya.

Bukan hanya pemerintah, tetapi juga para aktivis swasta pengritik pemerintah seringkali gagal memahami massa. Sebaliknya, kita tak perlu meromantisir massa sebagai Ratu Adil alternatif. Pada akhirnya, subversi massa harus diakui

terbentuk oleh ketidakberdayaan. Mereka tidak berdaya di bawah pihak yang berkuasa walau tidak sepenuhnya berkuasa mengendalikan kebinalan massa itu. Dalam lingkarannya seperti itu, para aktivis kelas menengah kota bisa berharap membuat sumbangan bermakna dengan mencoba membela kecil-kecilan apa yang masih dapat dibenahi pada perundangan dan proses pelaksanaan Pemilu. Tanpa perlu beban kompleksitas atau ambisi menjadi pahlawan besar. •